



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
UNIT KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : JAMALUDIN
2. Jabatan : KEPALA SATGAS POL. PP KEC. DUREN SAWIT
3. NHK : 951766

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.050.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 52 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 92 m2/122 m2 di KAB / KOTA
BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 169.000.000

1. MOBIL, TOYOTA RUSH 1,5 S AT Tahun 2010, HASIL SENDIRI
Rp. 115.000.000
2. MOTOR, HONDA C100 Tahun 1991, HASIL SENDIRI Rp.
2.500.000
3. MOTOR, YAMAHA SOLO Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp.
4.000.000
4. MOTOR, KAWASAKI EX250L / SOLO Tahun 2017, HASIL
SENDIRI Rp. 28.000.000
5. MOTOR, YAMAHA 20P-R AT / SOLO Tahun 2018, HASIL SENDIRI
Rp. 14.000.000
6. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI
Rp. 5.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 56.200.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 62.132.115



F. HARTA LAINNYA

Sub Total

Rp.

Rp.

1.337.332.115

III. HUTANG

Rp.

750.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

587.332.115

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.